

## ABSTRAK

Nur Hidayah, 126101203227, *Problematika Masyarakat Terhadap Upah Jasa Calo Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Tinjau Dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung : Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.

Kata Kunci : Upah Jasa Calo, Surat Izin Mengemudi, Hukum Positif, Hukum Islam.

Penelitian ini didasarkan dengan adanya fenomena yang terjadi di masyarakat tentang upah yang tidak jelas dan ketidakpastian hukum dalam menggunakan jasa calo sebagai perantara dalam menguruskan SIM baru. Dapat diketahui bahwa syarat sebagai seorang pengemudi yaitu harus memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Dalam pengurusan nya tentu tidak mudah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh setiap pendaftar SIM untuk bisa mendapatkan SIM tersebut. Banyaknya tahapan tersebut membuat sebagian dari para pendaftar merasa keberatan dan lebih memilih mencari cara instan dengan menggunakan jasa dari oknum yang biasa disebut dengan calo SIM. Biasanya seorang calo SIM akan menghampiri para pendaftar dilokasi dan menawarkan cara yang lebih mudah dan cepat tetapi ada yang sebaliknya justru pendaftar yang mencari calo tersebut untuk meminta bantuan. Kemudian calo SIM akan menetapkan harga yang tinggi dari harga asli pembuatan SIM, perolehan SIM yang tergolong ilegal dan dengan biaya yang tinggi tidak menyulutkan minat pendaftar SIM untuk menggunakan jasa calo agar memperoleh SIM.

Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana problematika masyarakat terkait dengan upah jasa calo dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi yang ada di Kabupaten Tulungagung ?; 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap upah jasa calo dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi yang ada di Kabupaten Tulungagung ?. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan problematika apa saja yang dialami oleh Masyarakat terkait dengan upah jasa calo dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi yang ada di Kabupaten Tulungagung. 2) Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap problematika upah jasa calo dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Jenis metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian

data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil pelaksanaan penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penetapan harga dalam pembuatan SIM baru melalui jasa calo ditetapkan diawal dengan kisaran harga Rp.700.000 – Rp.900.000, harga tersebut memiliki selisih yang jauh dibandingkan dengan mengurus SIM mandiri sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 2) Berdasarkan Hukum Islam tidak ada keterangan yang spesifik tentang calo, namun dalam fiqh kontemporer dijelaskan bahwa ada istilah *simsar* atau *samsarah* yang merupakan sebutan bagi seseorang yang berkerja untuk orang lain dengan imbalan (upah). Praktik calo menurut Hukum Islam diperbolehkan apabila akadnya jelas, jasanya jelas, ongkosnya jelas dan kedua belah pihak tau, kemudian calo itu sendiri juga tidak menyembunyikan kebohongan atau penipuan. tetapi permasalahannya sesuatu yang diperbolehkan tetapi berbenturan dengan aturan pemerintah yang sah melarang adanya calo maka kita sebagai masyarakat wajib mengikuti aturan pemerintah tersebut, karena dalam Tinjauan Hukum Positif meskipun tidak ada hukum yang mengaturnya secara spesifik tetapi aktivitas calo jelas illegal, karena secara ideal masyarakat seharusnya datang ke Satuan Penyelenggara Administrasi (SATPAS) kemudian melakukan serangkaian tes untuk melewati ujian yang telah disediakan sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Namun berdasarkan Hukum Positif calo menjadi diperbolehkan apabila calo memiliki surat kuasa sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1792.

## ABSTRACT

Nur Hidayah, 126101203227. Community Problems with Broker Service Wages In Making a Driving License in View of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Positive Law and Islamic Law (Case Study in Tulungagung Regency) Sharia Economic Law Study Program, Sharia Department, Faculty of Sharia and Legal Sciences, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung: Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.

Keywords : Brokerage Services Wages, Driving License, Positive Law, Islamic Law

This research is based on the phenomenon that occurs in society regarding unclear wages and legal uncertainty in using the services of brokers as intermediaries in arranging new SIMs. It is known that the standard for being a driver is that you must have a driver's license (Driving License) according to the type of vehicle you are driving. The process of processing it is certainly not easy, there are several stages that every SIM applicant must go through to be able to get the SIM. The many stages make some applicants feel reluctant and prefer to look for an instant method by using the services of individuals who are usually called SIM brokers. Usually a SIM broker will approach the registrants at the location and offer an easier and faster way, but there are those who, on the contrary, are actually registrants who are looking for the broker to ask for help. Then SIM brokers will set a price that is higher than the original price for making a SIM, obtaining a SIM that is classified as illegal and at a high cost does not arouse the interest of SIM registrants to use the broker's services to obtain a SIM.

The research focus in this research is 1) What are the community problems related to wages for brokers' services in making driving licenses in Tulungagung Regency?; 2) What is the review of Positive Law and Islamic Law regarding the wages of brokers in making driving licenses in Tulungagung Regency? The purpose of this research is 1) To describe the problems experienced by the community regarding the wages of brokers in making driving licenses in Tulungagung Regency. 2) To analyze the Review of Positive Law and Islamic Law on the problems of wages for brokers' services in making driving licenses in Tulungagung Regency.

This type of research method uses field research methods with a qualitative descriptive approach. The data collection techniques used are in-depth interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is data condensation, presentation data, drawing conclusions and verifying data. Meanwhile, to check the validity of the data, use triangulation.

The results of this research show that 1) The price for making a new SIM through broker services is set initially at a price range of Rp.700.000 - Rp. 900.000, this price has a large difference compared to obtaining an independent SIM according

to the SOP set by the Government. 2) Based on Islamic law there is no specific information about brokers, but in contemporary jurisprudence it is explained that there is the term *simsar* or *samsarah* which is a term for someone who works for someone else in return (wages). The practice of brokers according to Islamic law is permitted if the contract is clear, the services are clear, the costs are clear and both parties know, then the brokers themselves also do not hide lies or fraud, but the problem is that something is permitted but conflicts with government regulations which legally prohibit the existence of brokers so we As a society, we are obliged to follow government regulations. because in the Positive Law Review, although there is no law that specifically regulates it, the activities of brokers are clearly illegal, because ideally people should come to the Administrative Organizing Unit (SATPAS) and then take a series of tests to pass the exams that have been provided in accordance with the Traffic Law. However, based on Positive Law, brokers are allowed if the broker has a power of attorney in accordance with the Civil Code Article 1792.

## ملخص

نور هداية. 126101203227, مشاكل المجتمع مع أجور خدمة كال في الحصول على رخصة القيادة في ضوء القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك والقانون الوضعي والشريعة الإسلامية (دراسة حالة في محافظة تولونج أجونج) برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي قسم الشريعة كلية الشريعة والعلوم القانونية ولاية السيد علي رحمة الله الجامعة الإسلامية تولونج أجونج: د. ح. نور أفندي، م.ج.

الكلمات المفتاحية أجور خدمات الوساطة، رخصة القيادة، القانون الوضعي، الشريعة الإسلامية

يعتمد هذا البحث على الظاهرة التي تحدث في المجتمع وهي عدم وضوح الأجور والغموض القانوني في استخدام خدمات الوسطاء كوسطاء في ترتيب شرائح SIM الجديدة. من المعروف أن المعيار لكونك سائقاً هو أنه يجب أن يكون لديك رخصة قيادة (ووفقاً لنوع المركبة التي تقودها. من المؤكد أن عملية المعالجة ليست سهلة، فهناك عدة مراحل يجب على كل طالب الحصول على بطاقة SIM أن يمر بها حتى يتمكن من الحصول على بطاقة SIM. المراحل المتعددة تجعل بعض المتقدمين يشعرون بالتردد ويفضلون البحث عن طريقة فورية من خلال الاستعانة بخدمات الأفراد الذين يطلق عليهم عادة وسطاء SIM. عادةً ما يقوم وسيط SIM بالتواصل مع المسجلين في الموقع ويقدم لهم طريقة أسهل وأسرع، ولكن هناك من، على العكس من ذلك، هم مسجلون بالفعل يبحثون عن الوسيط لطلب المساعدة. بعد ذلك سيحدد سماسرة بطاقة SIM سعراً أعلى من السعر الأصلي لصنع بطاقة SIM، فالحصول على بطاقة SIM المصنفة على أنها غير قانونية وبتكلفة عالية لا يثير اهتمام مسجلي بطاقة SIM لاستخدام خدمات الوسيط للحصول على بطاقة SIM.

يركز البحث في هذا البحث على (1) ما هي المشكلات المجتمعية المتعلقة بأجور خدمات الوسطاء في إصدار رخص القيادة في منطقة تولونج أجونج؟؛ (2) ما هي مراجعة القانون الوضعي والشريعة الإسلامية فيما يتعلق بأجور الوسطاء في إصدار رخص القيادة في مقاطعة تولونج أجونج؟ الغرض من هذا البحث هو (1) وصف المشكلات التي يواجهها المجتمع فيما يتعلق بأجور الوسطاء في إصدار رخص القيادة في منطقة تولونج أجونج (2). لتحليل مراجعة القانون الوضعي والشريعة الإسلامية بشأن مشاكل الأجور لخدمات الوسطاء في إصدار رخص القيادة في منطقة تولونج أجونج.

يستخدم هذا النوع من أساليب البحث أساليب البحث الميداني ذات المنهج الوصفي النوعي. وكانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات المتعمقة والملاحظة والتوثيق. تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي تكثيف البيانات وعرضها البيانات واستخلاص النتائج والتحقق من البيانات. وفي الوقت نفسه، للتحقق من صحة البيانات، استخدم التثليث.

تظهر نتائج هذا البحث أن (1) تم تحديد سعر إنشاء شريحة SIM جديدة من خلال خدمات الوسيط مبدئياً بنطاق سعري قدره سبعمائة ألف روبية روبية، وهذا السعر به فرق كبير مقارنة

بالحصول على شريحة SIM مستقلة وفقاً لإجراءات التشغيل القياسية التي وضعتها الحكومة .  
(2) بناء على الشريعة الإسلامية لا توجد معلومات محددة عن السماسرة، ولكن في الفقه المعاصر  
تم توضيح أن هناك مصطلح السمسار أو السمسرة وهو مصطلح يطلق على شخص يعمل لدى  
شخص آخر مقابل الأجر .(إن ممارسة السماسرة حسب الشريعة الإسلامية جائزة إذا كان العقد  
واضحاً، والخدمات واضحة، والتكاليف واضحة، والطرفان يعلمان، فالوسطاء أنفسهم أيضاً لا  
يخفون كذباً أو احتيالاً، ولكن المشكلة أن شيئاً مباحاً ولكنه يتعارض مع اللوائح الحكومية التي  
تحظر قانوناً وجود الوسطاء، لذلك نحن كمجتمع، ملزمون باتباع اللوائح الحكومية .لأنه في  
مراجعة القانون الإيجابي، على الرغم من عدم وجود قانون ينظم ذلك على وجه التحديد، فمن  
الواضح أن أنشطة الوسطاء غير قانونية، لأنه من الأفضل أن يأتي الناس إلى وحدة التنظيم  
الإداري (SATPAS) ثم يأخذون سلسلة من الاختبارات لاجتياز الاختبارات التي تم توفيرها  
وفقاً لقانون المرور .ومع ذلك، بناءً على القانون الوضعي، يُسمح للوسطاء إذا كان لدى الوسيط  
توكيل وفقاً للمادة 1792 من القانون المدني.